



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2019/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

JUSNAH Binti MUDDIN, Lahir di Jokka, 1984 (Umur 35 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan: IRT, Pendidikan SD, Bertempat tinggal di Dusun Jokka Desa Bontonyeleng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

A. Agus Patra S.H Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, bertempat tinggal di Jalan D.I.Panjaitan No.14 Kel.Tanah Kongkong, Kec.Ujungbulu Kabupaten Bulukumba, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Maret 2019, yang telah diregistrasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor : 113/SK/III/2019/PA. Blk tanggal 25 Maret 2019 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

AJERI Bin JUMA, Lahir di Borong Tellu, 7-7-1982 (Umur 37 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan: Petani, bertempat tinggal di Borong Tellu, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

Hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Maret 2019 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 237/Pdt.G/2019/PA Blk, tanggal 26 Maret 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah suami isteri **sah yang menikah** pada Hari **Rabu**, tanggal **16 Pebruari 2011** di **Ponre Kec.Gantarang** Kabupaten Bulukumba, Berdasarkan **Kutipan Akta Nikah Nomor 249/04/IV/2011** tertanggal **16 Pebruari 2011** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah menikah **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal bersama di rumah orangtua **PENGGUGAT** di Dusun Jokka Desa Bontonyeleng Kec. Gantarang Kab.Bulukumba selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan terakhir **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal bersama di rumah **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** di Dusun Jokka Desa Bontonyeleng Kec.Gantarang Kab.Bulukumba selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
3. Bahwa dalam pernikahan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama **RAODATUL JANNAH Binti JAMALUDDIN**, **UMMU KALSUM Binti JAMALUDDIN**, dan **RISKA PUTRA WAHDI** (16 tahun);
4. Bahwa keadaan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak memasuki akhir tahun 2016 mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan kami renggang atau tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** pada intinya disebabkan :
 - a. **TERGUGAT** suka marah-marah dan berkata kasar;
 - b. **TERGUGAT** suka main perempuan (selingkuh) dan suka mabuk-mabukan;

Hal 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2019/PA.Blk



- c. TERGUGAT sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin PENGGUGAT;
- d. TERGUGAT dan PENGGUGAT telah bersepakat untuk berpisah (bercerai);
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Nopember 2016 di mana saat itu **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** kembali bertengkar karena **PENGUGAT** ketika melihat **TERGUGAT** bersama selingkuhannya dan kini sudah menjadi isterinya ;
7. Bahwa sejak kejadian itu, PENGUGAT dan TERGUGAT berpisah tempat dan tidak pernah lagi hidup bersama layaknya suami isteri, tanpa jaminan lahir dan bathin dari TERGUGAT sejak Nopember 2016;
8. Bahwa pihak keluarga sudah sering menasihati dan berupaya mendamaikan PENGUGAT dan TERGUGAT dengan berbagai upaya namun tidak berhasil;
9. Bahwa sejak kejadian itu, **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami isteri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kini **PENGUGAT** lebih memilih hidup sendiri daripada harus kembali pada **TERGUGAT**;
10. Bahwa kondisi rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah sedemikian parahnya sehingga dengan cara apapun, **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami isteri dan solusi yang terbaik bagi **PENGUGAT** adalah **BERCERAI** dengan **TERGUGAT**.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Ajeri bin Juma**) terhadap Penggugat (**Jusnah binti Muddin**);

Hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2019/PA.Blk



3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran pihak berperkara

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakli/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 1 April 2019 dan juga telah dipanggil melalui panggilan media massa Radio SPL Bulukumba pada tanggal 10 April 2019 dan 10 Mei 2019 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Tentang perdamaian

Bahwa, Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Tentang pemeriksaan dan pembuktian

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. **Surat** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 249/04/IV/2011, tanggal 16 Februari 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b. Saksi:

Saksi pertama bernama **Suhra binti Sappe**, umur 53 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2019/PA.Blk



- Bahwa saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama kurang lebih 9 tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak, namun sejak akhir tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa akibat seringnya cekcok Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang mencapai 3 tahun sejak tahun 2016;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi kedua bernama **Usman bin Sulaeman**, umur 41 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama kurang lebih 9 tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak, namun sejak akhir tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat seringnya cekcok Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang mencapai 3 tahun sejak tahun 2016;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa, kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi selain mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam

Hal 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Pertimbangan *legal standing* pihak berperkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor : 249/04/IV/2011 tanggal 16 Februari 2011, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2019/PA.Blk



Pertimbangan ketidakhadiran pihak berperkara

Menimbang bahwa, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Pertimbangan tentang perdamaian dan mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Pertimbangan pokok perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis oleh karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat, hingga kemudian antara penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri selama 3 tahun sejak tahun 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;

Hal 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2019/PA.Blk



- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan dapat dianggap membenarkan dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok masalah sebagai berikut:

- Apakah penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat?
- Apakah dengan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut mengakibatkan pada keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

Penilaian alat bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2019/PA.Blk



Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat, sedangkan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi **Suhra binti Sappe** dan saksi **Usman bin Sulaeman** masing-masing menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun namun sekarang tidak harmonis disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun sejak tahun 2016 dan hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi dan keterangannya pun secara materil patut dinyatakan telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, karena itu alasan-alasan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraianya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Pertimbangan fakta hukum dan kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Februari 2011, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekarang sudah tidak harmonis;

Hal 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2019/PA.Blk



3. Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun sejak tahun 2016 sampai sekarang tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit atau tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, adanya adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang *kedua* yaitu penyebab dari ketidak harmonisan tersebut karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat, *ketiga* yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan/atau tidak berada dalam satu tempat kediaman bersama yang sudah berlangsung selama 3 tahun sejak tahun 2016 hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, *keempat*, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal

Hal 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2019/PA.Blk



tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan 'azzawwaj al-maksuroh' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama 3 tahun sejak tahun 2016 hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu

Hal 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2019/PA.Blk



adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diceraikan daripada tetap disatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan

Hal 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **Ajeri bin Juma** terhadap Penggugat **Jusnah binti Muddin**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 M., bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1440 H., oleh: **M. Safi'i, S.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Wildana Arsyad, S.HI., M.HI**, dan **St. Hatijah, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

Hal 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurwahida, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa
Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota ;

Ketua Majelis,

Dr. Wildana Arsyad, S.HI., M.HI

M. Safi'i, S.Ag.

St. Hatijah, S.HI

Panitera Pengganti

Nurwahida, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Proses Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 355.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00
- Materai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 451.000,00
(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2019/PA.Blk